BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya di singkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar.

10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Sub Organisasi adalah bagian dari Perangkat Daerah yang berada di bawah kepala Perangkat Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalahsebagai berikut:

a. IKU;
b. penetapan IKU;
c. penggunaan IKU; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
IKU

Pasal 3

(1) IKU terdiri dari:
    a. IKU Pemerintah Daerah;
    b. IKU Perangkat Daerah; dan
    c. IKU Sub Organisasi pada Perangkat Daerah.
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) IKU Sub Organisasi pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
PENETAPAN IKU

Pasal 4

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.
(2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
(3) Penetapan IKU Sub Organisasi pada Perangkat Daerah mengacu pada IKU Perangkat Daerah.

(4) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*).

(5) Penetapan IKU selain mengacu pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan

c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV
PENGGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;

c. menyusun rencana aksi pencapaian kinerja;

d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Pembinaan atas pelaksanaan dan pengawasan IKU Sub Organisasi pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan IKU Pemerintah Daerah, IKU Perangkat Daerah dan IKU Sub Organisasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);

b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.	1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak	$IPM = \sqrt[3]{Indeks\ Kesehatan \times Indeks\ Pendidikan \times Indeks\ Daya\ Beli}$ $Indeks\ Kesehatan = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$ dengan UHH : Usia Harapan Hidup UHH_{maks} : Nilai Maksimum Usia Harapan Hidup UHH_{min} : Nilai Minimum Usia Harapan Hidup $Indeks\ Pendidikan = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ dengan I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah HLS : Harapan Lama Sekolah	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistk

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				HLS_{maks} : Nilai Maksimum Harapan Lama Sekolah HLS_{min} : Nilai Minimum Harapan Lama Sekolah $Indeks\ Daya\ Beli = \frac{ln_{(pengeluaran)} - ln_{(pengeluaran_{min})}}{ln_{(pengeluaran_{maks})} - ln_{(pengeluaran_{min})}}$ dengan - Indeks Daya Beli dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan - ln adalah logaritma natural		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan	$IPG = \frac{IPM_{Perempuan}}{IPM_{Laki-laki}}$ dengan $IPM_{Perempuan}$: Indeks Pembangunan Manusia Perempuan $IPM_{Laki-laki}$: Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki		Badan Pusat Statistik
2		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu	$Laju\ Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRB_{(t)} - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$ dimana $PDRB_{(t)}$: PDRB ADHK tahun pengamatan $PDRB_{(t-1)}$: PDRB ADHK tahun pengamatan sebelumnya	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perhubungan	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas.	2. Pendapatan Per Kapita	Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk (tiap orang) dalam suatu wilayah	$PDRB\ Per\ Kapita = \frac{PDRB}{\sum penduduk} \times 100\%$	3. Dinas Pertanian 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 6. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Badan Pusat Statistik
3	Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran.	1. Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	$P_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^{\propto}$ ɑ = 0 z = Garis Kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,....,q), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Pertanian	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Indeks Gini	Indeks Gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.	$$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i(Q_i + Q_{i-1})$$ dimana: P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Badan Pusat Statistik
4	Menurunnya Angka Pengangguran.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentasejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran.	$$Tingkat\ Pengangguran\ Terbuka = \frac{Jumlah\ penganggur\ terbuka\ usia\ angkatan\ kerja}{Jumlah\ penduduk\ angkatan\ kerja} \times 100\%$$ Jumlah pengangguran terbuka adalah usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100% Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih		Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja			
5	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan	IKLH = (30% × IKA) + (30% × IKU) + (30% × IKTL) Keterangan: IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Peningkatan Indeks Kualitas Air $Nilai\ relatif = \frac{c_i}{L_{ij}}$	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rumus Metode IP : $IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Rata-rata} + \left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$: baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 \leq PI_j \leq 5{,}0$: cemar ringan $5{,}0 \leq PI_j \leq 10{,}0$: cemar sedang $PI_j \geq 5{,}0$: cemar berat Peningkatan Indeks Kualitas Udara IKU = 100 – [50/0.9 x Ieu – 0.1)] Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan $IKTL = 100 - \left((84{,}3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54{,}3}\right)$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi mengukur kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai reformasi birokrasi	Akumulasi penilaian program-program reformasi birokrasi sebagai komponen pengungkit dengan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Komponen pengungkit terdiri dari : 1. Manajemen perubahan 2. Penataan peraturan perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tatalaaksana 5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia 6. Penguatan akuntabilitas 7. Penguatan pengawasan 8. Peningaktan kualitas pelayanan publik Komponen Hasil terdiri dari : 1. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2. Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme 3. Kualitas pelayanan publik	4. Sekretariat Daerah 5. Sekretariat DPRD 6. RSUD Ratu Zalecha 7. Kecamatan 8. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 9. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 10. Inspektorat Daerah 11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu sebagai sebuah sistem pengukuran terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah	$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$ $Skor\ Total = ISP + rata - rata\ ISI$ $ISP = \sum_{i=1}^{16} Skor\ Indikaor\ Satuan\ Pemda\ ke - i$ $rata - rata\ ISI = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=17}^{36} \begin{matrix} Skor\ Indikator\ Satuan \\ Inovasi\ ke - i \\ Inovasi\ ke - j \end{matrix}}{n}$ n = Jumlah Inovasi Daerah suat Pemerintah Daerah i = nomor indikator j = nomor iovasi ISP = Indikator Satuan Pemda ISI = Indikator Satuan Inovasi		Kementerian Dalam Negeri

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur	1. Rasio Kriminalitas	Rasio kriminalitas adalah jumlah tindakan pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Banjar	$Rasio\ Kriminalitas = \frac{Jumlah\ tindak\ kriminal\ tertangani\ dalam\ 1\ tahun}{Jumlah\ Penduduk} \times 10.000$	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3. Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Persentase Forum Komunikasi Umat Beragama yang ditindaklanjuti	Forum Kerukunan Umat Beragama adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan	$Persentase\ FKUB\ yang\ ditindaklanjuti = \frac{Jumlah\ kesepakatan\ dalam\ FKUB\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ seluruh\ kesepakatan\ dalam\ FKUB}$		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesional ASN	Perhitungan sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya"	$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i$ $IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Angka kasus konflik sosial	Jumlah kejadian benturan/bentrok fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan terganggunya stabilitas di daerah	Jumlah angka kasus kejadian konflik sosial yang terjadi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Persentase kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti	Persentase jumlah poin kesepkatan antara FKUB Kab. Banjar dengan Pemkab Banjar (Kesbangpol) yang dapat ditindaklanjuti secara Bersama oleh kedua belah pihak dan atau salah satu pihak	$= \frac{\sum Kesepakatan\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum Kesepakatan\ yang\ dibuat} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persentase jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih yang mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilu	$= \frac{\sum Masyarakat\ yang\ menggunakan\ hak\ pilihnya}{\sum Masyarakat\ yang\ terdaftar\ sebagai\ calon\ pemilih} X\ 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komisi Pemilihan Umum
3.	Terwujudnya Penanggulangan Bencana Alam	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/Kota adalah nilai gabungan antara Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat dan Indeks Ketahanan	$Indeks\ Kapasitas\ Daerah = (0{,}6 \times Skor\ Kesiapsiagaan) + (0{,}4 \times Skor\ Ketahanan)$ *Keterangan parameter dan bobot :* *Kesiapsiagaan 60%* *Ketahanan 40%*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.	$= \frac{(nilai\ penyajian\ dokumen\ penganggaran + nilai\ prosentase\ penyerapan\ anggaran + nilai\ penyajian\ laporan\ keuangan + prosentase\ pengelolaan\ BMD)}{4}$	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan barang milik daerah			
	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya; Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	$= \frac{realisasi\ tahun\ n\ -\ realisasi\ tahun\ n-1}{realisasi\ tahun\ n-1} \times 100\%$	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penilaian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Yang diukur melalui 4 (empat) aspek penilaian sebagai berikut :	$\boldsymbol{I}ndeks\ Perencanaan\ Pembangunan\ Daerah\ (IPD) = \sum\{Integrasi\ Perencanaan\ Pembangunan\ Daerah\ (AP1) + Sinkronisasi\ Perencanaan\ \&\ Penganggaran\ Pembangunan\ Daerah\ (AP2) + Sinergi\ Perencanaan\ Pembangunan\ Daerah\ \&\ SKPD\ (AP3) + Kinerja\ Efektivitas\ Pengendalian\ Pembangunan\ Daerah\ (AP4)\}$ Berikut Ini 4 (empat) aspek penilaian pada formulasi diatas : 1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

<table>
<tr><th>NO</th><th>KINERJA UTAMA</th><th>INDIKATOR TUJUAN (IKU)</th><th>PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL</th><th>FORMULASI</th><th>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
TABEL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANJAR
<table>
<tr><th>NO</th><th>ASPEK PENILAIAN</th><th></th><th>POINT PENGUKURAN</th><th>BOBOT MAKSIMAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah</td><td>24</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Definisi :
Keselarasan program antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>Keselarasan Program Renja SKPD dengan Program Prioritas (PP)</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>Keselarasan Program Renstra SKPD dengan Program RPJMD</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4</td><td>Keselarasan Kegiatan Renja SKPD dengan Kegiatan Renstra SKPD</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Definisi :
Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Definisi :
Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keselarasan IKU Daerah dengan IKU SKPD</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah</td><td>20</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">Kinerja Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah</td><td>18</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Definisi :
Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh SKPD dalam rangka pencapaian sasaran/target Prioritas Daerah, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKPD</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>80</td></tr>
</table>
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Bappedalitbang, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja
</td>
<td>
<table>
<tr><th>NO</th><th>DEFINISI</th><th>POIN PENGUKURAN</th><th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th><th>PENJELASAN</th></tr>
<tr><td colspan="5">AP 1 : Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah</td></tr>
<tr><td rowspan="11">1</td><td rowspan="11">Keselarasan program antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.</td><td>Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD</td><td>6</td><td>Yang dimaksud selaras jika : 1. Jumlah program di RKPD tdk melebihi jumlah program di RPJMD (Program RKPD ≤ Program RPJMD) 2. Nomenklatur Program di RKPD ada didalam RPJMD</td></tr>
<tr><td>RENTANG KESELARASAN</td><td>NILAI</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>1 Komponen Terpenuhi
2 Komponen Terpenuhi</td><td>3
6</td></tr>
<tr><td>Keselarasan Program Renja SKPD dengan Program Prioritas (PP).</td><td>6</td><td>Yang dimaksud selaras jika : 1. Program prioritas di RPJMD yang masuk dalam Renja SKPD sesuai dengan Tusi nya RPJMD</td></tr>
<tr><td>RENTANG KESELARASAN</td><td>NILAI</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>Terpenuhi 100%
50< x < 99
25 < x<49
0 < x < 24
Tidak sama sekali</td><td>6
5
4
3
0</td></tr>
<tr><td>Keselarasan Program Renstra SKPD dengan Program RPJMD</td><td>6</td><td>Yang dimaksud selaras jika : 1. Nomenklatur program di Renstra yang ada di dalam RPJMD 2. Jumlah program di Renstra seluruh SKPD tidak melebihi jumlah program di RPJMD</td></tr>
<tr><td>RENTANG KESELARASAN</td><td>NILAI</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>1 Komponen Terpenuhi
2 Komponen Terpenuhi</td><td>3
6</td></tr>
<tr><td>Keselarasan Kegiatan Renja SKPD dengan Kegiatan Renstra SKPD</td><td>6</td><td>Yang dimaksud selaras jika : 1. Nomenklatur kegiatan di Renja Seluruh SKPD yang ada di dalam Renstra Seluruh SKPD 2. Jumlah kegiatan di Renja seluruh SKPD tidak melebihi jumlah kegiatan di Renstra Seluruh SKPD</td></tr>
<tr><td>RENTANG KESELARASAN</td><td>NILAI</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>1 Komponen Terpenuhi
2 Komponen Terpenuhi</td><td>3
6</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 1</td><td>24</td></tr>
</table>
2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
<table>
<tr><th>NO</th><th>DEFINISI</th><th>POIN PENGUKURAN</th><th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th></tr>
<tr><td colspan="4">AP 2 : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</td></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">AP 2 : Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD</td><td>Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD</td><td>18</td></tr>
<tr><td>RENTANG KESELARASAN</td><td>NILAI</td></tr>
<tr><td>Terpenuhi 100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>0 < x < 100</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Tidak sama sekali</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 2</td><td>18</td></tr>
</table>
3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
<table>
<tr><th>NO</th><th>DEFINISI</th><th>POIN PENGUKURAN</th><th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th><th>PENJELASAN</th></tr>
<tr><td colspan="5">AP 3 : Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD</td></tr>
<tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keselarasan IKU Daerah dengan IKU SKPD</td><td>Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah</td><td>20</td><td rowspan="2">Selaras jika :
1. IKU SKPD adalah turunan dari IKU Daerah
2. Perbandingan cascading SKPD dengan cascading Kabupaten</td></tr>
<tr><td>RENTANG KESELARASAN</td><td>NILAI</td></tr>
<tr><td>91 - 100 %</td><td>20</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>75 sd 90 %</td><td>15</td></tr>
<tr><td>50 sd 74 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>< 50 %</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 3</td><td>25</td><td></td></tr>
</table>
4. Kinerja Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO</th><th>KINERJA UTAMA</th><th>INDIKATOR TUJUAN (IKU)</th><th>PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL</th><th>FORMULASI</th><th>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>NO</th><th>DEFINISI</th><th>POIN PENGUKURAN</th><th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th></tr>
<tr><td colspan="4">AP 4 : Kinerja Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah</td></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">AP 4 : Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah</td><td>Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh SKPD dalam rangka pencapaian sasaran/target Prioritas Daerah, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKPD</td><td>18</td></tr>
<tr><td>RENTANG KESELARASAN</td><td>NILAI</td></tr>
<tr><td>91 - 100 %</td><td>18</td></tr>
<tr><td>75 sd 90 %</td><td>13,5</td></tr>
<tr><td>50 sd 74 %</td><td>9</td></tr>
<tr><td>< 50 %</td><td>4,5</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 4</td><td>18</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan</td><td>Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan adalah hasil Penelitian dan Pengembangan n-1 yang dimanfaatkan berdasarkan salah satu kriteria berikut :
- tertuang di dalam rencana kerja perangkat daerah
- tertuang di dalam prioritas daerah
- tertuang di dalam perumusan kebijakan yang dibuktikan dengan data dukung/laporan/berita acara</td><td>$= \frac{(Hasil\ Penelitian\ yang\ dimanfaatkan\ Tahun\ lalu)}{(Jumlah\ Hasil\ Penelitian\ Tahun\ lalu)} \times 100\%$</td><td>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</td><td>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Meningkatnya Pengembangan Kepariwisataan Daerah</td><td>1. Jumlah Kunjungan Wisata</td><td>Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banjar untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri</td><td>Penjumlahan dari wisatawan per hari yang berkunjung ke tempat destinasi wisata</td><td>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata</td><td>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata</td></tr>
</table>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Lama Kunjungan Wisata	Lama kunjungan adalah banyaknya hari yang dihabiskan wisatawan di Kabupaten Banjar.	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		3. Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran wisatawan adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan wisata di Kabupaten Banjar Pengeluaran wisatawan merupakan penjumlahan dari biaya yang dikeluarkan wisatawan setiap wisatawan per hari untuk keperluan : a. Akomodasi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk akomodasi dan pengeluaran makan dan minum yang tidak dapat dipisahkan dengan akomodasi. b. Makan dan minum adalah semua pengeluaran makan dan minum selama melakukan perjalanan. c. Transportasi lokal adalah pengeluaran untuk transportasi lokal yang digunakan selama berada di Kabupaten Banjar, dalam hal ini transportasi yang digunakan adalah transportasi darat, dan laut/penyeberangan. d. Belanja adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan belanja kebutuhan selama berada di kabupaten Banjar.	$= \frac{Pengeluaran\ seluruh\ wisatawan\ (yang\ disurvey)}{jumlah\ wisatawan\ (yang\ disurvey)}$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Pelestarian Budaya	1. Cakupan Pelestarian Budaya	Cakupan pelestarian budaya adalah unsur budaya benda dan tak benda yang telah di lakukan upaya perlindungan/pengembngan/pemanfaatan	$= \frac{jumlah\ unsur\ benda\ dan\ tak\ benda\ yang\ telah\ dilestarikan}{seluruh\ unsur\ budaya\ benda\ dan\ tak\ benda} \times 100$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	Meningkatnya Prestasi Olahraga serta Pemuda yang berkarakter dan Mandiri	1. Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	Prestasi olahraga adalah atlet yang mendapatkan medali. Prestasi dalam olahraga adalah atlet yang memperoleh medali dalam event olahraga. Event olahraga yang diikuti adalah event /kejuaraan provinsi, kejuaraan nasional dan internasional Medali yang diperoleh meliputi emas, perak, dan perunggu.	Jumlah Medali dari Prestasi dari event atau kejuaraan provinsi, kejuaraan Nasional dan Internasional.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		2. Jumlah Pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan Nasional	Jumlah pemuda yang mengikuti lomba atau seleksi yang mewakili kabupaten ke tingkat provinsi maupun nasional dan masuk dalam kategori juara lomba IMTAQ,PASKIBRAKA PEMUDA PELOPOR PPAN, KUPP, JPI, Kepramukaan, dan kegiatan kepemudaan lainnya. Kategori juara: yang mendapatkan piala dan piagam penghargaan.	Jumlah Pemuda yang mendapatkan piala atau piagam penghargaan.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		3. Persentase Wirausaha Muda	Wirausaha Muda adalah pemuda yang memiliki izin usaha, mampu membuka lapangan kerja, serta menghasilkan barang atau jasa	$= \frac{Jumlah\ wirausaha\ muda}{Jumlah\ pemuda\ suatu\ daerah} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7.	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Diperoleh dari nilai SKM Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang (0,11)	$= \frac{total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times 0,11$ $= IKM\ Unit\ Pelayanan \times 25$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	Jumlah penduduk yang Memiliki dokumen yang lengkap (meliputi: akta+KK+KTP-el atau KIA) dibagi jumlah penduduk Kabupaten Banjar dikali 100 persen	$= \frac{Jumlah\ penduduk\ yang\ lengkap\ dokumen\ kependudukan}{Jumlah\ penduduk\ Kab.Banjar} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatus, Angka Kematian Bayi dan Stunting	1. Angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup adalah banyaknya kematian yang terjadi pada Ibu hamil karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas per 100.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian antara lain : Pendarahan, infeksi, Eklamsi dll	$= \frac{Jumlah\ kematian\ ibu\ melahirkan}{Jumlah\ kelahiran\ hidup\ dalam\ kurun\ waktu\ yang\ sama} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2. Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup	Angka kematian neonates per 1000 Kelahiran Hidup adalah Banyaknya kematian neonatus s/d usia 28 hari per 1.000 Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. Penyebab kematian antara lain : Asfiksia, Bayi Berat Lahir Rendah, Infeksi, kelainan bawaan dll	$= \frac{Jumlah\ kematian\ neonatal}{Jumlah\ kelahiran\ hidup\ dalam\ kurun\ waktu\ yang\ sama} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup adalah Banyaknya kematian bayi dari 0 hari s/d 11 bulan 29 hari per 1.000 Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. Penyebab kematian antara lain : Sepsis, Asfiksia, Bayi berat lahir rendah, Infeksi dll	$= \frac{Jumlah\ kematian\ bayi\ disatu\ wilayah\ kerja}{Jumlah\ kelahiran\ hidup\ dalam\ kurun\ waktu\ yang\ sama} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		4. Prevalensi stunting pada balita	- umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi	$= \frac{Jumlah\ balita\ stunting\ (pendek\ dan\ sangat\ pendek)}{Jumlah\ balita\ yang\ diukur\ indeks\ \frac{PB}{U}\ atau\ TB/U} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Persentase penyakit menular yang tertangani	Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasite mengenai penyakit menular terdiri dari Tuberkulosis (TB), *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Demam Berdarah (DB), malaria, diare, hepatitis Penyakit menular yang tertangani adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah mengenai Penanggulangan Penyakit Menular.	$= \frac{Jumlah\ PM\ yang\ ditangani}{Jumlah\ kasus\ yang\ ada\ dikabupaten\ Banjar} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase pengendalian dan pencegahan Penyakit Tidak Menular	Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis (Permenkes mengenai Penanggulangan Penyakit Tidak Menular) terdiri dari Diabetes Melitus (DM), Hipertensi (HT) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat. Pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.	$= \frac{Jumlah\ \ penderita\ PTM\ yang\ dikendalikan\ dan\ dicegah}{Jumlah\ penderita\ PTM\ yang\ ada\ dikabupaten\ Banjar} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Mutu pelayanan dan Sumber Daya kesehatan	1. Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.	$= \frac{Jumlah\ fasyankes\ yang\ terakreditasi}{Jumlah\ seluruh\ fasyankes\ dikabupaten\ Banjar} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan; pusat kesehatan masyarakat; klinik; rumah sakit; unit transfusi darah; laboratorium kesehatan; fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum			
		2. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standard/akreditasi kediklatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 9 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, Kesehatan Lingkungan, kefarmasian, gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang lulus ujian kompetensi dan memiliki sertifikat sesuai dengan profesi masing-masing.	$= \frac{Jumlah\ SDMK\ dengan\ sertifikat\ dan\ kompetensi}{Jumlah\ seluruh\ SDMK\ dikabupaten\ Banjar} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.	Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah	1. Indeks Ketahanan Pangan	Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator. Indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut : IFI = 1/9 (IAV + IBPL + IROADP + I LIT+ ILEX + INUT + IWATER + IHEALTH } Keterangan : I Ketersediaan Pangan ; 1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubikayu + ubijalar” II Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan; 2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik III Pemanfaatan Pangan ; 5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar (underweight) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih	$IFI = \frac{1}{9}\{IAV + IBPL + IROADP + I\ LIT + ILEX + INUT + IWATER + IHEALTH\}$ *Keterangan :* *I Ketersediaan Pangan ;* *1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubikayu + ubijalar”* *II Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan;* *2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan* *3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai* *4. Persentase rumah tangga tanpa akseslistrik* *III Pemanfaatan Pangan ;* *5. Angka harapan hidup saat lahir* *6. Berat badan balita di bawah standar (underweight)* *7. Perempuan buta huruf* *8. Rumah tangga tanpa akseske air bersih* *9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan*	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan			
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Nilai PDRB sektor perikanan atas dasar harga konstan pada tahun n sebesar Rp., lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp. atau mengalami pertumbuhan sebesar xx%. dibandingkan dengan target pada tahun n sebesar xx% maka diperoleh capaian sebesar xx%	$g = \frac{PDRB_{sektor\ t} + PDRB_{sektor\ t-1}}{PDRB_{sektor\ t-1}} \times 100\%$ *Keterangan :* *g = pertumbuhan sektor* *PDRB sektor t = PDRB Sektor pada tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya* *PDRB Sektor t-1 = PDRB Sektor pada tahun sebelumnya*	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Badan Pusat Statistik
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perangkat Daerah adalah salah satu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah internet yang disediakan 28 Perangkat Daerah dari 47 Perangkat Daerah termasuk kecamatan	$= \frac{Jumlah\ OPD\ yang\ terhubung\ dengan\ akses\ internet\ yang\ disediakan\ oleh\ Dinas\ Kominfo}{Jumlah\ SKPD} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase tindak lanjut aduan yang ditangani dengan cepat sesuai dengan SOP	Pengaduan masyarakat atau laporan masyarakat yaitu 5 hari paling lambat selama 14 hari kerja	$= \frac{Rata - rata\ lama\ hari\ penanganan\ aduan\ yang\ tertangani}{lama\ hari\ penanganan\ maksimal} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Data statistik yang di gunakan dalam penysunan dokumen Perangkat Daerah sebanyak 27 Perangkat Daerah dan 20 kecamatan yang ada di kabupaten banjar	$= \frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ yang\ menggunakan\ data\ statistik\ dalam\ menyusun\ perencanaan\ pembangunan\ daerah}{Jumlah\ Perangkat\ Daerah} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Penerapan Persandian di Kabupaten Banjar	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi	Perangkat daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi 1 Perangkat Daerah	$= \frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ yang\ menggunakan\ sandi\ dalam\ komunikasi\ antar\ perangkat\ daerah}{Jumlah\ Perangkat\ Daerah} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11.	Meningkatnya akselerasi industri pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan (LPE Sektor industri)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan (LPE Sektor industri) merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun sebelumnya	$= \frac{PDRB\ sektor\ Industri\ Pengolahan\ tahun\ N - PDRB\ sektor\ Industri\ Pengolahan\ tahun\ (N-1)}{PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan\ Tahun\ (N-1)} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (LPE Sektor Perdagangan)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor perdagangan (khususnya perdagangan besar dan eceran) Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor perdagangan (khususnya perdagangan besar dan Eceran) tahun sebelumnya	$= \frac{PDRB\ sektor\ Perdagangan\ Besar\ Eceran\ Tahun\ N - PDRB\ sektor\ Perdagangan\ Besar\ Eceran\ Tahun\ (N-1)}{PDRB\ sektor\ Perdagangan\ Besar\ \&\ Eceran\ Tahun\ (N-1)} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas merupakan perbandingan jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, Volume usaha dan aset terhadap jumlah seluruh koperasi	$= \frac{\sum Koperasi\ yang\ berkualitas\ berdasarkan\ RAT,\ Volume\ Usaha\ \ Aset}{\sum koperasi} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha merupakan perbandingan Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha terhadap jumlah usaha mikro keseluruhan	$= \frac{\sum usaha\ mikro\ yang\ menjadi\ wirausaha}{\sum usaha\ mikro} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
12.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Kabupaten	1. Indeks Konektivitas	Jaringan jalan dan jembatan diambil dari variabel : panjang jaringan jalan yang dibangun , jalan kabupaten dengan kondisi mantap, jembatan kabupaten dalam kondisi baik.	$= \frac{Panjang\ Jalan\ Penghubung\ Pusat - \sum Pusat\ Kegiatan\ dan\ Pusat\ Produksi\ (akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM)}{(Jalan\ Penghubung\ Pusat - \sum Pusat\ Kegiatan\ dan\ Pusat\ Produksi\ (target\ keseluruhan)} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2. Indeks Infrastruktur	Indeks infrastruktur dihitung dengan persentase pembobotan yakni :	1) Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase (10%); 2) Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (30%); 3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah (25%); dan 4) Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (35%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3. Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	Persentase Total Perusahaan atau Penyedia Jasa yang Aktif Terhadap Total Perusahaan di Kabupaten Banjar	$= \frac{\sum Total\ Perusahaan\ atau\ Penyedia\ Jasa\ yang\ Aktif}{\sum Perusahaan\ di\ Kab.Banjar} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang dihitung dengan persentase pembobotan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (70%) dan Persentase Ijin yang Dikeluarkan (30%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Nilai IKM didapat dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara periodik. Survei kepuasan masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik, memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu: (1) Persyaratan, (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur , (3) Waktu Penyelesaian , (4) Biaya/Tarif, (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku Pelaksana Pelayanan, (8) Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan Pelayanan, dan (9) Sarana dan prasarana.	$Bobot\ Nilai\ Rata - Rata\ Tertimbang = \frac{\sum Bobot}{\sum Unsur} \times 100\%$ $IKM = \frac{\sum Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{\sum Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$ $Nilai\ Interval\ Konversi\ IKM = IKM\ Unit\ Pelayanan \times 25$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
13.	Terwujudnya perlindungan masyarakat melalui pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terpadu	1. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Banjar, terhitung sejak call center Damkar menerima informasi/ laporan dari masyarakat sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.	$= \frac{Jumlah\ layanan\ penyelamatan\ dan\ evakuasi\ korban\ kebakaran\ di\ wilayah\ Kab.Banjar\ pada\ Tahun\ N}{Jumlah\ kasus\ yang\ diterima\ call\ center\ Damkar\ Kab.Banjar\ pada\ Tahun\ N} \times 100\%$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Non Kebakaran)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, baik gangguan hewan berbahaya, Laka kerja, laka lantas, orang tenggelam, bencana alam dan dapat melakukan pencarian orang hilang yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar terhitung sejak diterima info masuk laporan masyarakat ke petugas Damkar dan Penyelamatan, sampai petugas teknis tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	$= \frac{Jumlah\ dan\ jenis\ layanan\ penyelamatan\ dan\ evakuasi\ pada\ kondisi\ membahayakan\ manusia\ (operasi\ darurat\ non\ kebakaran)\ di\ wilayah\ Kab.Banjar\ pada\ Tahun\ N}{Jumlah\ kasus\ yang\ diterima\ call\ center\ Damkar\ Kab.Banjar\ pada\ Tahun\ N} \times 100\%$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14.	Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa	1. Persentase Desa Mandiri	Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Klasifikasi Desa Mandiri ditetapkan dengan ambang batas IDM > 0,8155	$= \frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri}{Jumlah\ Seluruh\ Desa\ se\ Kabupaten\ Banjar} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase Desa Maju	Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Klasifikasi Desa Maju ditetapkan dengan ambang batas 0,7072 < IDM ≤ 0,8155	$= \frac{Jumlah\ Desa\ Maju}{Jumlah\ Seluruh\ Desa\ se\ Kabupaten\ Banjar} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3. Persentase Desa Berkembang	Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Klasifikasi Desa Berkembang ditetapkan dengan ambang batas 0,5989 < IDM ≤ 0,7072	$= \frac{Jumlah\ Desa\ Berkembang}{Jumlah\ Seluruh\ Desa\ se\ Kabupaten\ Banjar} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4. Persentase Penurunan Desa Tertinggal	Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Klasifikasi Desa Tertinggal ditetapkan dengan ambang batas 0,4907 < IDM ≤ 0,5989	$= \frac{Desa\ Tertinggal\ Tahun\ Sebelumnya - Desa\ Tertinggal\ Tahun\ Sekarang}{Jumlah\ Desa\ Tertinggal\ Tahun\ Sebelumnya} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
15.	Meningkatnya Nilai Investasi dan Pelayanan Publik	1. Nilai Investasi	Realisasi Investasi tahunan yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ada di Kabupaten Banjar	Nilai realisasi investasi yang masuk dibuat dalam satuan rupiah (Rp) dalam 1 tahun. Realisasi Investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan	$Nilai\ Indeks\ = \sum \sum (Nilai\ unsur\ pelayanan\ x\ 0{,}11)$ $Nilai\ IKM\ = Nilai\ Indeks\ \times 25$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan.	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : $HLS_a^t = Harapan\ Lama\ Sekolah\ pada\ umur\ a\ di\ tahun\ t$ $E_i^t = Jumlah\ penduduk\ usia\ i\ yang\ bersekolah\ pada\ tahun\ t$ $P_i^t = Jumlah\ penduduk\ usia\ i\ pada\ tahun\ t$ $i = usia\ (a, a+1, \dots, n)$ $FK = faktor\ koreksi\ pesantren$	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik
		2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama\ sekolah\ penduduk\ ke - i)$ Dengan : $P_{15+} = Jumlah\ penduduk\ berusia\ 15\ tahun\ ke\ atas$ $Lama\ sekolah\ penduduk\ ke - i =$ *a. Tidak pernah sekolah = 0* b. *Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1* c. *Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1* d. *Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir* *e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1*	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1 Angka Kelulusan SD	Jumlah peserta didik lulusan pada jenjang SD, dihitung dengan perbandingan jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya	$AL\ SD = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ SD}{Jumlah\ siswa\ tingkat\ tertinggi\ pada\ jenjang\ SD/MI\ pada\ tahun\ sebelumnya} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2 Angka Kelulusan SMP	Angka kelulusan SMP adalah Jumlah peserta didik lulusan pada jenjang SMP, dihitung dengan perbandingan jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya	$AL\ SMP = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ SMP}{Jumlah\ siswa\ tingkat\ tertinggi\ pada\ jenjang\ SMP\ pada\ tahun\ sebelumnya} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
17.	Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	Keterjangkauan daerah untuk mencapai moda transportasi darat dan sungai	$= ((IK1\ x\ persentase\ bobot\ angkutan\ jalan) + (IK2\ x\ persentase\ bobot\ angkutan\ sungai, Danau\ dan\ Penyeberangan))$ *dengan :* $IK1\ (angkutan\ jalan) = \frac{Jumlah\ trayek\ yang\ dilayani\ pada\ kabupaten/kota \times bobot\ trayek}{(Jumlah\ Kebutuhan\ trayek\ pada\ kabupaten/kota}$ $IK2\ (Angkutan\ Sungai, Danau\ dan\ Penyeberangan) = \frac{Jumlah\ lintas\ penyeberangan\ yang\ beroperasi\ pada\ kabupaten/kota \times bobot\ lintas}{(Jumlah\ kebutuhan\ lintas\ penyeberangan\ pada\ kab/kota}$ *Keterangan :* *Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan, untuk wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan Jalan = 70)* *obot Trayek atau Lintas :* *Bobot trayek atau lintas dengan frekeunsi tinggi (> 5x dalam seminggu), bobot = 1*	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
18.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Indeks yang mengukur perkembangan literasi Masyarakat berdasarkan perbandingan antara unsur pembangunan literasi masyarakat dengan aspek masyarakat. Unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) adalah Aspek Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan ber SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) adalah jumlah total penduduk atau masyarakat pada suatu wilayah yang disesuaikan dengan segmentasi jenis perpustakaannya.	$IPLM = \sum_i \frac{\mathrm{UPLM}_i}{\mathrm{AM}_i} X\ 100$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah Tingkat Perilaku atau Kebiasaan Masyarakat dalam Memperoleh Pengetahuan dan Informasi dari Berbagai Bentuk Media berdasarkan aspek frekuensi membaca (FM), durasi membaca (DM), jumlah buku yang dibaca (JB), frekuensi akses internet (FAI), dan durasi akses internet (DAI)	$TGM = (0{,}3\ FM + 0{,}3\ DM + 0{,}3\ JB) + (0{,}05\ FAI\ +\ 0{,}05\ DAI)$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Pengelolaan Kearsipan Daerah Berkulitas	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip (IKPA)	Indek kualitas pengelolaan arsip adalah Nilai yang menggambarkan kualitas pengelolaan arsip pada unit kearsipan I (LKD) dan pengelolaan arsip pada unit kearsipan II (SKPD) melalui Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Pengawasan Kearsipan Internal LAKE adalah laporan audit kearsipan eksternal. LAKI adalah laporan audit kearsipan internal.	$IKPA = 60\%\ LAKE\ +\ 40\%\ LAKI)$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Merupakan jumlah produksi pertanian pada tahun berkenaan (n) dikurangi jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) dikali 100 persen Komoditas produksi pertanian yang diperhitungkan adalah komoditas unggulan daerah, yaitu pangan (padi), hortikultura (jeruk, pisang, durian, cabe), perkebunan (karet) dan peternakan (ternak besar)	$Q_{(\%)} = \frac{Q((n)) - Q((n-1))}{Q((n-1))} \times 100\%$ *Keterangan :* *Q(%) = persentase peningkatan produksi pertanian* *Q(n) = jumlah produksi pertanian pada tahun berkenaan (n)* *Q(n-1) = jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1)*	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
20.	Meningkatnya perumahan yang layak huni	1. Persentase rumah Layak Huni	Meningkatnya rumah layak huni	$= \frac{Jumlah\ rumah\ layak\ huni}{Jumlah\ rumah\ keseluruhan} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase PSU yang memadai	Terpenuhinya PSU minimal 3 komponen dari 7 komponen	$= \frac{Jumlah\ perumahan\ dan\ permukiman\ yang\ telah\ memenuhi\ min\ 3\ komponen\ PSU}{Jumlah\ Perumahan\ dan\ Permukiman} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Kawasan Permukiman yang layak	1. Persentase kawasan kumuh	Penanganan terhadap kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati	$= \frac{luas\ total\ kawasan\ kumuh\ dikurangi\ luas\ kawasan\ kumuh\ yang\ ditangani}{luas\ total\ kawasan\ kumuh\ \ di\ Kabupaten\ Banjar} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2. Indeks Kualitas Air	Kumulatif nilai IP air pada titik-titik pemantauan	$= \sum (persentase\ status\ IP\ air\ \times\ bobot\ )$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		3. Indeks Kualitas Udara	Perbandiangan nilai rata-rata tahunan parameter SO2 dan NO2 terhadap baku mutunya	$= 100 - ((50 \div 0{,}9)\ x\ (PU - 0{,}1))$ *Keterangan :* *PU = Indeks Pencemar Udara* $PU = 50\%\ INDEKS\ SO2 + 50\%\ INDEKS\ NO2$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Yang Menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan Yang Dihitung Dari Kondisi Tutupan Hutan dan Tutupan Vegetasi Non Hutan	$IKTL = 100 - ((84{,}3 - (TL \times 100))\ x \frac{50}{54{,}3})$ *Keterangan :* *IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan* *TL = Tutupan Lahan*	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	$= \frac{Pemanfaatan\ Lingkungan}{Kesesuaian\ Terhadap\ Dokumen\ Lingkungan,\ Izin\ Lingkungan, Izin\ RPPLH} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	Persentase Timbulan Sampah Perkotaan Yang Tertangani	$= \frac{Jumlah\ Timbulan\ Sampah\ Perkotaan}{Sampah\ Perkotaan\ Yang\ Di\ Tangani} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
21.	Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS terbagi menjadi 26 jenis, yaitu sebagai berikut: 1. Anak Balita Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 4. Anak Jalanan 5. Anak Dengan Kedisabilitasan 6. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 7. Lanjut Usia Terlantar	$\frac{Jumlah\ PPKS\ yang\ Mandiri}{Jumlah\ PPKS\ Seluruhnya}\ x\ 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			8. Penyandang Disabilitas 9. Tuna Susila 10. Gelandangan 11. Pengemis 12. Pemulung 13. Kelompok Minoritas 14. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan 15. Orang dengan HIV/AIDS 16. Korban Penyalahgunaan NAPZA 17. Korban Trafficking 18. Korban Tindak Kekerasan 19. Pekerja Migran Bermasalah Ekonomi 20. Korban Bencana Alam 21. Korban Bencana Sosial 22. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 23. Fakir Miskin 24. Keluarga Bermasalah Ekonomi 25. Berumah Tidak Layak Huni 26. Komunitas Adat Terpencil Mandiri yang di maksud yaitu mampu berkehidupan sosial di masyarakat dengan bantuan-bantuan baik bersifat konsumtif atau berupa barang untuk beraktifitas sosial			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.	$IDG = {}^{1}/_{3}\,(Ipar + IDM + Lin - Dist)$ Ipar = indeks keterwakilan di parlemen IDM = indeks pengambilan keputusan Linc-Dist = indeks distribusi pendapatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indikator menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA)	$IPA = \sum_{j=1}^{5} (W_j \times Indeks\ Kj)$ 1. Hak Sipil dan Kebebasan (20%) 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (22%) 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (18%) 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (18%) 5. Perlindungan Khusus (22%)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. Persentase Perlindungan Hak Perempuan	Pemberian layanan terhadap hak perempuan yang mengalami kekerasan meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, pendampingan tokoh agama dan rumah aman	$\frac{Jumlah\ Layanan\ yang\ Diberikan\ kepada\ Perempuan}{Jumlah\ Layanan\ Laporan\ Kasus\ Kekerasan\ Perempuan}\ x\ 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. *Total Fertility Rate* (TFR)	*Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.	$\text{TFR} = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} \text{ASFRi}$ $\frac{ASFRi: ASFR\ untuk\ wanita\ pada\ kelompok\ usia\ ke-i}{i = kelomok\ usai\ 15-19, 20-24 \ldots\ldots, 45-49}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistik
		2. Indeks Pembangunan Keluarga	Suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga.	$indek\ pembangun\ keluarga = \frac{\text{indeks ketentraman+ indeks kem}andirian\text{+indeks }kebahagiaan}{3}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
22.	Fasilitasi Penyediaan Lapangan Kerja Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka	Penganggur terbuka, terdiri dari: Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.	$Tingkat\ Pengangguran\ Terbuka\ (TPT) = \frac{jumlah\ Pengangguran\ (PP)}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ (PAK)} \times 100\%$ *Keterangan:* *TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)* *PP : Jumlah pengangguran (orang)* *PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)*	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Pusat Statistik
	Fasilitasi penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial serta SDM kawasan Ex. Transmigrasi	Persentase Kawasan Ex.Transmigrasi Yang Maju	Ex. Transmigrasi adalah Desa yg memliki sumber daya sosial dan ekonomi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, Adapan Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT adalah sebagai berikut : Kec. Sungai Pinang :1. Kahelaan, 2. Rantau bakula, 3. Rantau nangka. 4. Sumber baru, 5. Sumber harapan, 6.Belimbing lama, 7.Belimbing Baru. 8. Hakim Makmur ,: Kec. Simpang Empat : 1. Galam Rabah I, 2. Galam Rabah II, 3. Galam Rabah III, 4. Galam Rabah IV, 5. Galam Rabah 5, 6. Belanti II , 7. Cintapuri , : Kec. Sungai Tabuk : 1. Riam kanan I : Kec. Aluh-aluh: 1. Tambak Padi, : Kec. Paramasan : 1. Angkipih : Kec. Martapura : 1. Riam Kanan II	$= \frac{Jumlah\ kawasan\ ex. Transmigrasi\ \ yang\ Maju}{Jumlah\ kawasan\ ex, transmigrasi\ keseluruhan} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

<table>
<tr><th>NO</th><th>KINERJA UTAMA</th><th>INDIKATOR TUJUAN (IKU)</th><th>PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL</th><th>FORMULASI</th><th>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th></tr>
<tr><td rowspan="2">23.</td><td rowspan="2">Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas Dan Efektif</td><td>1. Indeks Integritas
Target: 71,66</td><td>Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, dalam ruang lingkup budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengelolaan anggaran yang terbentuk dari angka skala 1 hingga 100.

Nilai Indeks Integritas semakin tinggi, maka sistem yang berjalan semakin baik dalam mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi.</td><td>Survei oleh Komisi Pemberantasan Korupsi</td><td>Inspektorat Daerah</td><td>Komisi Pemberantasan Korupsi</td></tr>
<tr><td>2. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
Target: 80%</td><td>Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah (IKKI) merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern perangkat daerah di Kabupaten Banjar</td><td>$Indeks\ Kepatuhan\ dan\ Kinerja\ Intern$
$= \sum (unsur\ kinerja\ utama \times 40\%)$
$+(unsur\ kepatuhan \times 30\%)$
$+(unsur\ pelayanan\ umum \times 30\%)$

Nilai hasil akhir dari penjumlahan unsur-unsur akan dipergunakan untuk menentukan indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah dengan kategori :

<table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai Angka</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>>90-100</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>BB</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>B</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>CC</td><td>>60-70</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>C</td><td><60</td><td>Kurang</td></tr></table></td><td>Inspektorat Daerah</td><td>Inspektorat</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO</th><th>KINERJA UTAMA</th><th>INDIKATOR TUJUAN (IKU)</th><th>PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL</th><th>FORMULASI</th><th>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</th><th>SUMBER DATA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3. Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP
Target : 4,20</td><td>Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP diperoleh berdasarkan survei pengguna dengan responden seluruh objek pengawasan. Survei dilakukan terhadap aspek keahlian (kompetensi), aspek kinerja dan aspek perilaku</td><td>$= \frac{Persepsi\ Keahlian + Persepsi\ Kinerja + Persepsi\ Perilaku}{3}$
<table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai Angka</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>>90-100</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>BB</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>B</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>CC</td><td>>60-70</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>C</td><td><60</td><td>Kurang</td></tr></table></td><td>Inspektorat</td><td>Inspektortat</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>Meningkatnya Mutu Pelayanan RSUD Ratu Zalecha</td><td>1. IKM Rumah Sakit</td><td>Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari rumah sakit, melalui kuisioner yang dibagikan kepada pengunjung Rumah Sakit</td><td>$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi}\ x\ Nilai\ Penimbang$</td><td>RSUD RATU ZALECHA</td><td>RSUD RATU ZALECHA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. Akreditasi Rumah Sakit</td><td>Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap ukuran kinerja, struktur dan proses yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan dengan menggunakan penilaian dari LIPA (Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi).</td><td>Hasil penilaian 16 Bab melalui survei akreditasi RS oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan minimal 15 Bab lulus</td><td>RSUD RATU ZALECHA</td><td>Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi,</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3. SPM Rumah Sakit</td><td>Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. SPM RS meliputi : Indikator-Indikator yang menjadi standar dalam pencapaian target di unit/ Instalasi/ Bidang tertentu.</td><td>$= \frac{Hasil\ penilaian\ SPM\ yang\ terpenuhi}{Nilai\ capaian\ SPM\ yang\ harus\ dipenuhi}\ x\ 100\ \%$</td><td>RSUD RATU ZALECHA</td><td>RSUD RATU ZALECHA</td></tr>
</table>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan dinilai melalui hasil cakupan masing masing program/ kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penilai internal RS			
25.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Persentase penurunan angka pelanggaran perda dan perkada	1. Persentase penurunan angka pelanggaran perda dan perkada merupakan ukuran atas perwujudan situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 2. Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum 3. Pelanggar Gangguan Trantibum adalah masyarakat ataupun badan hukum yang melakukan perilaku tidak tertib baik yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum 4. Pelanggaran Perda adalah masyarakat dan badan hukum yang melakukan perilaku tidak tertib yang melanggar Peraturan daerah dan perkada yang memuat sanksi	$= \frac{\textit{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum pada tahun } n - \textit{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun } 2020\ (\textit{data awal})}{\textit{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun } 2020\ (\textit{data awal})}\ x\ 100\ \%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			5. Data Awal adalah angka pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2020 dimana jumlah angka pelanggaran Perda dan gangguan trantibum berjumlah 1002 pelanggaran 6. Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain : a) Tertib tata ruang. b) Tertib jalan c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. e) Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai. f) Tertib lingkungan. g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu. h) Tertib bangunan. i) Tertib sosial. j) Tertib kesehatan. k) Tertib tempat hiburan dan keramaian. l) Tertib peran serta masyarakat.			

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			m) Ketentuan lain sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing.			
		2. Persentase Satlinmas Aktif	1. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas 2. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan 3. Anggota Satlinmas Aktif adalah : a) melaksanakan dan membantu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja maupun dalam menanggulangan bencana baik sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan pada pasca bencana b) melaksanakan dan membantu tugas dan fungsi di pemerintahan tingkat desa/kelurahan	$= \frac{Jumlah\ Satlinmas\ Aktif\ se\ Kabupaten\ Banjar}{Jumlah\ Satlimas\ sekabupaten\ Banjar}\ x\ 100\ \%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh tim pengumpul data sesuai Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan variatif waktu pengambilan survei. Ada beberapa teknik survei yang dipakai seperti wawancara tatap muka langsung kepada responden atau responden mengisi sendiri kuesioner yang diberikan. 2. Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada masyarakat terdiri dari 9 unsur yang relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap 4 pilihan jawaban yang tersedia sebagaimana kuisioner terlampir dan sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar 3. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 76,61 – 88,30 B Baik 88,31 – 100 A Sangat Baik	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
26.	Meningkatnya Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	$= \frac{Jumlah\ Rakoor\ yang\ dilaksanakan}{Rakoor\ yang\ direncanakan/diusulkan} \times 100$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Nilai LPPD	Berupa menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik	penilaian yang diberikan oleh Kemendagri	Sekretariat Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Meningkatnya Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Penoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	$= \frac{Jumlah\ Rakoor\ yang\ dilaksanakan}{Rakoor\ yang\ direncanakan/diusulkan} \times 100$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal "BAIK" dari LKPP	Hasil Kumulatif Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Oleh LKPP	Sekretariat Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
	Meningkatnya Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	1. Persentase Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	$= \frac{Jumlah\ Rakoor\ yang\ dilaksanakan}{Rakoor\ yang\ direncanakan/diusulkan} \times 100$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		2. Nilai SAKIP	Peringkat yang diberikan oleh Kemenpan setiap tahunnya yang mencerminkan tingkat akuntabilitas perangkat daerah dalam mempertanggung jawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis	Nilai yang diberikan oleh Kemenpan	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
		3. Nilai IKM Kab. Banjar	Nilai Kumulatif hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari unit pelayanan publik	$= Nilai\ SKM\ unit\ penyelenggara\ pelayanan\ publik \times 25$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		4. Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Peringkat/Nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar setiap Semester yang mencerminkan tingkat Kepatuhan dan Kinerja Intren pada perangkat daerah	Peringkat/Nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar	Sekretariat Daerah	Inspektorat
27.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Survei terhadap tingkat kepuasan unsur Pimpinan dan Anggota DPRD menunjukkan komitmen untuk terus memacu peningkatan kinerja pelayanan	$= Nilai\ Rata - rata\ unsur\ pelayanan\ Tahun\ n \times Nilai\ Penimbang$ *Keterangan :* *Nilai Penimbang = 25*	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Aluh-Aluh	Sekretariat Daerah
29.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Aranio	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
30.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kinerjanya	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Astambul	Sekretariat Daerah
31.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kinerjanya	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
32.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Cintapuri Darussalam	Sekretariat Daerah
33.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Gambut	Sekretariat Daerah
34.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi :	Pemerintah Kecamatan Karang Intan	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
35.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar	Sekretariat Daerah
36.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Martapura	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
37.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyeenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Martapura Barat	Sekretariat Daerah
38.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Martapura Timur	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
39.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Mataraman	Sekretariat Daerah
40.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Paramasan	Sekretariat Daerah
41.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi :	Pemerintah Kecamatan Pengaron	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
42.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Sambung Makmur	Sekretariat Daerah
43.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
44.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Sekretariat Daerah
45.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
46.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Tatah Makmur	Sekretariat Daerah
47.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung	Sekretariat Daerah

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR